

Received: 03 December 2024

Revised: 12 March 2025

Accepted: 07 May 2025

Implementasi Skill Passport Bidang Keahlian Tata Boga: Studi Kualitatif di Kalimantan Timur

Henry Winnarko^{1*}, Tuatul Mahfud², Yuli Fitrianto³, Yogiana Mulyani⁴, Andi Yasir Amsal⁵,
Erick Sorongan⁶

^{1,2,4,5,6}Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

³Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

*henry.winnarko@poltekba.ac.id

Abstract

The dynamics of the industrial world and the world of work (IDUKA) have an impact on the flexibility of vocational education, especially Vocational High Schools (SMK). Additionally, the concept of recognising learning experiences for vocational high school students also needs to be applied. One implementation of recognition that can be used is the skill passport. However, studies on skill passports in vocational high schools have not been discussed clearly. Therefore, this study aims to determine the implementation of ASEAN Toolbox-based learning in vocational high schools in the field of culinary expertise, the implementation of competency tests for vocational high school students in the field of culinary expertise, and the implementation of skill passports in vocational high schools in the field of culinary expertise in East Kalimantan Province. The method used is a qualitative method. Descriptive qualitative methods are used to obtain in-depth information about the implementation of the skill passport in vocational high schools. This study employs a qualitative method, collecting data through interviews with the principal, head of the study program, head of LSP, and productive teachers at the Centre of Excellence vocational high schools. The results of this study indicate that teachers are aware of the ASEAN Toolbox, which was developed from ACCSTP and CATC. However, most teachers and vocational high schools have not implemented ASEAN Toolbox-based learning. The contributing factors are the lack of understanding and training on ASEAN Toolbox and ACCSTP standards; challenges in adjusting the curriculum to ASEAN standards, limited time and teacher workload; and limited knowledge about industry needs and globalization. Additionally, the implementation of competency tests (UKK) in vocational high schools specialising in culinary expertise is carried out through the Professional Certification Institute (LSP) 1. There is a change in the competency test scheme for vocational high school students, which was originally a cluster scheme, has been changed to a qualification scheme, and will ultimately be changed to an occupation scheme. Another finding is that the implementation of recording competency achievements as student portfolios in vocational high schools in the field of culinary expertise in East Kalimantan Province is still limited to the form of subject learning achievement assessments carried out every semester and is only limited to evaluating mastery of subject content and has not directed the evaluation of competency achievements based on SKKNI or ASEAN Toolbox.

Keywords: skill passport, RPL, ASEAN Toolbox, SMK

Abstrak

Dinamika dunia industri dan dunia kerja (IDUKA) memberikan dampak terhadap fleksibilitas pendidikan kejuruan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, konsep rekognisi terhadap pengalaman belajar pada siswa SMK juga perlu diterapkan. Salah satu implementasi rekognisi yang dapat diterapkan yaitu skill passport. Namun, studi mengenai skill passport di SMK belum banyak dibahas secara jelas. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis *ASEAN Toolbox* di SMK bidang keahlian tata boga, pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK bidang keahlian tata boga, dan implementasi skill passport di SMK bidang keahlian tata boga di Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi skill passport di SMK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dari wawancara dengan kepala sekolah, kaprodi, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan guru produktif di SMK Pusat keunggulan. Hasil penelitian ini menunjukkan para guru telah mengetahui terkait *ASEAN Toolbox* yang dikembangkan dari ACCSTP dan CATC. Namun, sebagian besar guru dan SMK belum menerapkan pembelajaran berbasis *ASEAN Toolbox*. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang *ASEAN Toolbox* dan standar ACCSTP; tantangan dalam menyesuaikan

kurikulum dengan standar ASEAN, keterbatasan waktu dan beban kerja guru; dan keterbatasan pengetahuan tentang kebutuhan industri dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan uji kompetensi (UKK) di SMK bidang keahlian Tata Boga dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1. Adanya perubahan skema uji kompetensi siswa SMK yang semula skema klaster berubah menjadi skema kualifikasi dan pada akhirnya saat ini berubah menjadi skema okupasi. Temuan lainnya, implementasi perekaman capaian kompetensi sebagai portofolio siswa di SMK bidang keahlian Tata Boga di Provinsi Kalimantan Timur masih terbatas pada bentuk asesmen capaian pembelajaran mata pelajaran yang dilakukan setiap semester dan hanya sebatas evaluasi penguasaan konten mata pelajaran dan belum mengarahkan evaluasi capaian kompetensi baik berdasarkan SKKNI maupun *ASEAN Toolbox*.

Kata kunci: skill passport, RPL, ASEAN Toolbox

© 2025 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP). This work is licensed under CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Dinamisasi dunia industri dan dunia kerja (IDUKA) memberikan dampak bahwa kondisi kestabilan bekerja pada satu perusahaan atau industri bukanlah suatu hal yang dapat dijamin lagi (Eby et al., 2003). Buktinya, banyak fenomena pemindahan kerja atau bahkan pemutusan kerja di berbagai sektor bisnis sebagai akibat pandemic COVID-19 ini (Bajrami et al., 2020; Jung et al., 2021; Lee et al., 2021). Selain itu, hadirnya teknologi Revolusi Industri 4.0 juga telah mendisrupsi dunia kerja secara total baik pekerjaan formal maupun pekerjaan non-formal. Proses produksi dan proses layanan Industri 4.0 berbasis *Cyber Physical Production System* (CPPS) merubah sistem kerja, prosedur dan proses kerja. Perubahan struktur ketenagakerjaan di IDUKA tersebut perlu diantisipasi dan di respon dengan baik oleh lembaga pendidikan khususnya pendidikan vokasi untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan tersebut. Peran pendidikan kejuruan berperan untuk membantu individu agar sukses dalam pendidikan dan pekerjaannya, serta mendukung kebutuhan keterampilan pasar tenaga kerja di masa depan (Wolf, 2011). Selain itu, pendidikan kejuruan juga berperan untuk meningkatkan transisi dari sekolah ke pekerjaan (Breen, 2005).

Dalam konsep pendidikan vokasi berbasis *work-based learning*, pengakuan atau penghargaan terhadap pengalaman belajar sangatlah penting guna memberikan pengakuan atas prestasi belajar atau keterampilan yang telah diperoleh. Namun, konsep pengembangan pengakuan pengalaman belajar harus dikembangkan secara holistik terutama melibatkan dunia industri. Pentingnya mengembangkan model pengakuan pengalaman belajar siswa dalam bentuk sertifikat kompetensi dapat memberikan keuntungan terhadap lembaga yaitu berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat dan evaluasi hasil belajar siswa yang terukur. Disamping itu, penilaian *outcome* pembelajaran kejuruan harus dikembangkan berdasarkan kerangka kerja yang jelas dan juga perlu mempertimbangkan pencapaian kompetensi sebelumnya yang dapat dilakukan tes/uji kompetensinya (*Recognition of Prior Learning/RPL*) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sertifikasi kompetensi. Kajian RPL di pendidikan kejuruan baik dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia khususnya dalam hal peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (Cameron, 2011). Miller (Miller, 2009) menjelaskan bahwa RPL memberikan sejumlah manfaat yang meliputi: 1) membantu tenaga kerja tetap mengikuti perkembangan kualifikasi tenaga kerja; 2) mengurangi biaya pelatihan; 3) menunjang kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas; 4) memberikan solusi terhadap tuntutan ketenagakerjaan nasional dan internasional.

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui sertifikasi kompetensi sangat relevan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, pengembangan model *skill e-passport* berstandar

ASEAN juga sangat relevan dengan Proyek Prioritas RP-JMN 2020-2024 yang mendorong penguatan sertifikasi kompetensi pada pendidikan vokasi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 2020). Pengalaman belajar maupun capaian kompetensi siswa baik di dalam maupun di luar sekolah dapat diakui dan disetarakan sesuai capaian jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau standar lain yang lebih tinggi. Saat ini, perkembangan sertifikasi kompetensi sektor pariwisata telah banyak menggunakan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional berdasarkan ACCSTP (*ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals*) dan CATC (*Common ASEAN Tourism Curriculum*) dari MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) ASEAN di bidang pariwisata. Penerapan uji kompetensi berstandar ASEAN akan memungkinkan lulusan dapat bersaing di skala internasional karena dokumen sertifikat tersebut sudah diakui pada skala ASEAN dan internasional. Pada tahap implementasi, penerapan uji kompetensi skema okupasi bidang pariwisata menghadapi kendala karena banyaknya materi uji unit kompetensi pada setiap okupasi. Banyaknya materi uji tersebut memungkinkan pengujian pada setiap unit kompetensi dilakukan kurang maksimal tanpa adanya portofolio capaian kompetensi. Sehingga, pengujian kompetensi skema okupasi dengan menggunakan metode uji portofolio dinilai sangat tepat karena pengalaman capaian kompetensi peserta uji sebelumnya dapat diakui dan disetarakan pada uji kompetensi skema okupasi ini.

Salah satu yang dapat dilakukan yaitu pengakuan capaian kompetensi belajar siswa berbasis *skill passport*. Penyetaraan capaian hasil belajar dalam bentuk capaian kompetensi berbasis *skill passport* siswa pada setiap semester dapat diintegrasikan pada dokumen portofolio uji kompetensi siswa yang dilakukan pada akhir masa studinya di SMK. Selain itu, mekanisme pengakuan pengalaman capaian kompetensi berstandar ACCSTP (*ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals*) dan CATC (*Common ASEAN Tourism Curriculum*) dari MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) ASEAN belum pernah ditetapkan. Implementasi *skill passport* ini akan memudahkan bagi Asesor untuk menelusuri kualifikasi calon assesi yang akan diuji. Basis data kualifikasi asesi dalam bentuk *skill passport* memberikan manfaat bagi asesor sehingga memudahkan dalam proses penilaian saat uji kompetensi berlangsung.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian ini dilaksanakan pada SMK di Kalimantan Timur khususnya pada bidang keahlian Tata Boga untuk mendukung kebutuhan SDM dibidang Pariwisata terutama dalam persiapan perkembangan IKN Nusantara kedepannya. Peneliti akan membahas mengenai bagaimana kondisi pembelajaran, pelaksanaan uji kompetensi, dan implementasi *skill passport* di SMK bidang keahlian pariwisata konsentrasi keahlian tata boga. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis ASEAN Toolbox di SMK bidang keahlian Tata Boga, pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK bidang keahlian Tata Boga, dan implementasi *skill passport* di SMK bidang keahlian pariwisata konsentrasi keahlian tata boga di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang menitikberatkan pada mencari sebuah makna, arti, symbol, konsep, deskripsi karakteristik maupun gejala dari sebuah peristiwa yang bersifat holistic dan alami, focus serta multimetode yang menggunakan beberapa teknik, kualitas yang memiliki prioritas, serta data yang tersaji secara deskriptif ataupun naratif. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dari suatu kejadian dengan prosedur ilmiah sehingga didapatkan makna dari suatu kejadian dengan cara interaksi antar personal dalam kejadian tersebut (Hardani, 2023).

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Pusat Keunggulan bidang pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut: SMK Negeri 4 Balikpapan, SMK Negeri 3 Samarinda,

SMK Negeri 4 Samarinda, SMK Negeri 2 PPU, dan SMK Negeri 4 PPU. Sementara itu, pengumpulan data penelitian ini melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang terdiri dari satuan pendidikan, dinas pendidikan daerah, dan IDUKA/ Asosiasi Profesi. Selain itu, pemangku kepentingan sertifikasi profesi di wilayah Kalimantan Timur pada bidang pariwisata. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi *skill passport* dalam kegiatan uji kompetensi melalui rekam jejak portofolio sehingga mendapat pengakuan legal bagi pengguna lulusan. Waktu penelitian ini terhitung mulai bulan September hingga bulan November 2024. Sumber informan wawancara meliputi kepala sekolah, ketua program studi, ketua LSP, dan guru produktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview dengan narasumber untuk menggali informasi yang lebih dalam, pengambilan data kurikulum, dan dokumentasi. Teknik penyajian data menggunakan model Miles dan Huberman pada (Hamzah & Kurniawan, 2020). Penyajian data diawali dengan reduksi data, penyajian data dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun topik yang akan difokuskan adalah implementasi skill passport di SMK bidang keahlian tata boga.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder. Data primer dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan yang merupakan kepala sekolah, ketua program studi, ketua LSP, dan guru produktif. Jenis kelamin informan adalah laki-laki dan perempuan Rentang Pendidikan terakhir adalah S1–S2. Adapun sekolah yang dipilih dalam penelitian ini merupakan SMK Pusat Keunggulan bidang pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut: SMK Negeri 4 Balikpapan, SMK Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4 Samarinda, SMK Negeri 2 PPU, dan SMK Negeri 4 PPU.

Pengembangan *skill passport* merupakan agenda penting untuk merekognisi kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman belajar siswa SMK. *Skill passport* memberikan pengakuan formal terhadap keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh siswa selama proses pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan sebelumnya sangatlah diperlukan untuk membantu siswa SMK memperoleh rekam jejak capaian kompetensi sebelumnya. Dan selanjutnya, bukti rekam jejak capaian kompetensi siswa disajikan dalam bentuk portofolio kompetensi atau dikenal sebagai *skill passport*. *Skill passport* tidak hanya mendorong siswa memiliki bukti konkret mengenai kompetensi yang dimiliki, tetapi juga membantu mereka untuk dapat menavigasi dunia kerja dan membuktikan keahlian mereka kepada calon pemberi kerja. Adanya *skill passport* dapat mendukung pengembangan karier siswa dan peningkatan daya saing siswa di pasar kerja internasional.

Langkah awal pengembangan *skill passport* dimulai dengan pengumpulan daftar kebutuhan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD) dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari Kepala dan guru SMK, Pengelola Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2024 di Kantor BRIDA Kalimantan Timur untuk menganalisis kebutuhan (*need assessment*) pengembangan *skill Passport* siswa SMK pada bidang keahlian Tata Boga. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendapatkan kondisi eksisting terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis ASEAN *Toolbox*, uji kompetensi siswa, serta implementasi *skill passport*.

a. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis ASEAN *Toolbox*

Salah satu temuan penting dari FGD adalah perlunya peningkatan pemahaman guru dan siswa tentang konsep ASEAN *Toolbox*. Sebagian besar guru telah mengetahui terkait ASEAN *Toolbox* yang dikembangkan dari ACCSTP (*ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals*) dan CATC (*Common ASEAN Tourism Curriculum*) dari MRA (*Mutual Recognition Arrangements*) ASEAN di bidang pariwisata. Namun, sebagian besar guru dan SMK belum menerapkan pembelajaran berbasis ASEAN *Toolbox*. Hal ini dinyatakan pada salah satu hasil wawancara pada salah satu guru produktif di SMK.

“Saya sebenarnya sudah pernah dengar mengenai ASEAN Toolbox, hanya saja jujur hingga saat ini belum pernah mempelajari secara detail apa saja isi dari ASEAN Toolbox. Dan memang juga saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi itu (ASEAN Toolbox). Harusnya sih kalau memang itu standar internasional, bisa dan harus diimplementasikan di SMK.” (W1, GP, 8/10/2024).

Secara teoritis, ACCSTP merupakan serangkaian standar kompetensi dalam rangka MRA-TP. Selain itu, ACCSTP dirancang untuk memfasilitasi penyeragaman tentang praktik pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk para profesional pariwisata di ASEAN. ACCSTP merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam profesi pariwisata di ASEAN. Harapannya, implementasi ACCSTP dapat membekali para profesional pariwisata untuk memiliki sertifikat kompetensi berstandar ASEAN sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di kawasan ASEAN.

Oleh karena itu, ASEAN *Toolbox* sebagai standar pemenuhan kompetensi pada bidang pekerjaan pariwisata perlu diterapkan pada konteks pembelajaran di SMK bidang pariwisata. Relevansi antara materi uji kompetensi dengan materi pembelajaran perlu dilakukan di satuan pendidikan SMK. Hal ini mempertimbangkan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25/D/M/2023 tentang pengemasan skema okupasi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2023 dan disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Skema sertifikasi okupasi ini merupakan sertifikasi yang didasarkan pada jabatan kerja tertentu dalam sistem industri yang telah ditetapkan secara nasional. Selain itu, skema ini diinisiasi sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan industri.

Berdasarkan telaah konten terhadap unit kompetensi skema okupasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada bidang pariwisata diperoleh bahwa unit-unit kompetensi tersebut relevan dengan standar ACCSTP. Artinya, materi uji kompetensi yang digunakan untuk uji kompetensi siswa SMK menggunakan standar ASEAN. Dengan demikian, SMK perlu melakukan penyelarasan kurikulum yang mengacu pada ASEAN *Toolbox* (standar ACCSTP). Penyelarasan ini bertujuan untuk menyediakan kurikulum yang seragam di seluruh negara ASEAN untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata memiliki kualitas yang setara. Sehingga penerapan kurikulum berstandar ACCSTP akan mendorong terpenuhinya capaian kompetensi bagi para lulusan SMK berstandar internasional. Dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing lulusan SMK di tingkat global.

Namun, hasil wawancara dengan salah satu Kepala sekolah SMK di Samarinda menyatakan “menurut sepengetahuan saya, selama ini pelaksanaan pembelajaran untuk guru bidang produktif masih belum terintegrasi dan belum dapat memahami sepenuhnya mengenai ASEAN Toolbox serta masih menerapkan standar SKKNI “(W2, KS, 8/10/2024). Oleh karena itu, berdasarkan telaah kualitatif pada penelitian ini mengungkapkan bahwa para guru SMK Bidang Keahlian Tata Boga belum menggunakan ASEAN *Toolbox* sebagai perangkat pembelajaran pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Para guru SMK yang mengajarkan bidang tata boga belum sepenuhnya

memahami cara mengintegrasikan elemen-elemen dari ACCSTP dan CATC ke dalam kurikulum SMK. Ada beberapa alasan mengapa para guru SMK bidang keahlian tata boga belum sepenuhnya mengintegrasikan *ASEAN Toolbox*, serta elemen-elemen dari ACCSTP dan CATC ke dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Beberapa alasan utama yang mendasarinya antara lain adalah:

1. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan tentang *ASEAN Toolbox* dan Standar ACCSTP

Salah satu alasan utama adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai tentang *ASEAN Toolbox* (ACCSTP) di kalangan para guru SMK. Banyak guru tata boga yang belum mendapatkan pembekalan yang cukup mengenai bagaimana cara mengintegrasikan ACCSTP ke dalam pembelajaran. Meskipun ACCSTP menyediakan berbagai sumber daya dan materi yang dapat mendukung pengajaran sesuai dengan standar ASEAN, para guru merasa kesulitan dalam memanfaatkannya tanpa adanya pelatihan teknis atau pendampingan yang sistematis. Jika guru tidak dilatih untuk memahami konten, struktur, dan aplikasi dari ACCSTP serta cara menggunakannya dalam konteks pengajaran sehari-hari, maka para guru akan kesulitan untuk menerapkannya secara efektif.

2. Tantangan dalam Menyesuaikan Kurikulum dengan Standar ASEAN

Integrasi ACCSTP dan CATC ke dalam kurikulum SMK memerlukan perubahan dalam struktur pembelajaran dan penyesuaian dengan standar kompetensi internasional. Banyak guru yang merasa bahwa kurikulum yang ada di SMK sudah cukup padat, dan menambahkan elemen-elemen baru dari ACCSTP membutuhkan penyesuaian yang cukup besar, khususnya terkait materi ajar maupun metode pengajaran. Kurikulum yang ada belum dirancang untuk sepenuhnya mengakomodasi standar internasional ini, dan para guru perlu waktu untuk menyesuaikan metode ajar yang sudah ada dengan standar kompetensi ASEAN. Selain itu, tantangan penggunaan materi ajar berbahasa Inggris di ACCSTP juga menjadi kendala mendasar bagi para guru SMK untuk mengimplementasikannya. Tanpa adanya panduan dan pelatihan yang jelas dan terstruktur, para guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan standar-standar tersebut dengan cara yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Guru

Guru SMK yang mengajarkan bidang tata boga sering kali memiliki beban kerja yang sangat tinggi, mulai dari mengajar, menyiapkan materi pembelajaran, hingga mengelola administrasi. Dengan banyaknya tanggung jawab yang harus dipenuhi, para guru sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan mengintegrasikan ACCSTP dan CATC ke dalam rencana pembelajaran mereka. Selain itu, banyak guru yang lebih terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan mungkin merasa tidak cukup waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih berbasis standar internasional. Dalam hal ini, tekanan waktu dan beban kerja menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menghambat penggunaan *ASEAN Toolbox* sebagai perangkat pembelajaran di sekolah.

4. Keterbatasan Pengetahuan tentang Kebutuhan Industri dan Globalisasi

Guru-guru SMK di bidang tata boga juga mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengikuti standar internasional yang diterapkan dalam ACCSTP dan CATC. Dalam banyak kasus, pengetahuan tentang perkembangan industri kuliner dan pariwisata yang berskala internasional masih terbatas. Beberapa guru mungkin masih mengacu pada standar lokal atau nasional yang sudah ada, tanpa memahami sepenuhnya bagaimana kompetensi global, seperti yang diatur dalam

ACCSTP. Padahal, pengetahuan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi siswa mereka di pasar kerja yang semakin terintegrasi secara regional dan global. Tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya standar ASEAN ini, guru mungkin enggan untuk mengubah metode pengajaran mereka.

5. Persepsi tentang Kesesuaian Standar ASEAN dengan Kebutuhan Lokal

Beberapa guru juga merasa bahwa standar ACCSTP dan CATC terlalu kompleks atau tidak sepenuhnya relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan industri di wilayah tempat mereka mengajar. Para guru berpikir bahwa standar yang ditetapkan oleh ASEAN lebih cocok diterapkan di negara-negara dengan industri pariwisata yang lebih maju, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi industri lokal. Karena itu, ada anggapan bahwa integrasi standar internasional ini tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pengajaran di tingkat lokal. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa para guru kurang bersemangat untuk mengimplementasikan *ASEAN Toolbox* dalam pengajaran, meskipun sebenarnya *ASEAN Toolbox* ini dirancang untuk menyelaraskan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di ASEAN.

Oleh karena itu, mengacu pada deskripsi pelaksanaan pembelajaran berbasis *ASEAN Toolbox* sangat penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan sumber daya yang memadai kepada para guru SMK di bidang tata boga. Dukungan yang kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat diperlukan agar *ASEAN Toolbox* dapat diintegrasikan dengan baik dalam proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan siswa SMK untuk bersaing di industri pariwisata dan kuliner internasional.

b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK

Pelaksanaan uji kompetensi di SMK bidang keahlian Tata Boga merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri. Uji kompetensi di SMK atau di kenal dengan istilah Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana keterampilan dan kompetensi siswa di bidang keahlian yang telah dipelajari selama masa pendidikan. UKK di SMK dilaksanakan dengan berbagai metode yang melibatkan berbagai lembaga dan mitra industri untuk memastikan bahwa hasil ujian kompetensi benar-benar relevan dan sesuai dengan standar industri. Berdasarkan tinjauan kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan UKK di SMK bidang keahlian Tata Boga dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1. LSP P1 merupakan salah satu jenis Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh institusi pendidikan atau pelatihan yang berfungsi untuk melaksanakan uji kompetensi bagi peserta didiknya. Pada konteks ini, keberadaan LSP P1 memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa lulusan SMK benar-benar siap dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. LSP 1 bertindak sebagai lembaga yang diakui untuk menyelenggarakan uji kompetensi yang mengacu pada skema kompetensi yang relevan dengan program keahlian yang dimiliki oleh siswa.

Implementasi uji kompetensi siswa SMK pada bidang keahlian Tata Boga khususnya di Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa perubahan skema yang disesuaikan dengan perkembangan dunia industri dan tuntutan pasar kerja. Hal ini dinyatakan pada salah satu hasil wawancara pada salah satu Kepala sekolah SMK di Balikpapan.

“.....Menurut sepengetahuan saya telah terjadinya perubahan skema kualifikasi menjadi skema okupasi uji kompetensi pada bidang f&B produk dan service “(W3, KS, 16/10/2024).

Salah satu perubahan signifikan dalam sistem uji kompetensi ini adalah peralihan dari skema klaster menuju skema kualifikasi, dan kini bertransformasi menjadi skema okupasi. Pada awalnya, pelaksanaan uji kompetensi di SMK Tata Boga mengadopsi skema klaster, yang merupakan sistem pengujian berbasis kelompok kompetensi yang saling berkaitan. Pada skema klaster uji kompetensi siswa SMK adalah salah satu bentuk pendekatan dalam mengukur dan menilai kompetensi siswa SMK yang berfokus pada kelompok kompetensi tertentu yang relevan dengan dunia industri spesifik. Skema ini dirancang untuk menguji keterampilan siswa dalam suatu bidang atau sektor pekerjaan tertentu, yang pada umumnya mencakup berbagai kompetensi dasar yang mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas pekerjaan di industri tersebut.

Selanjutnya, skema uji kompetensi siswa SMK mengalami perubahan menjadi skema kualifikasi. Skema ini lebih berfokus pada tingkat kualifikasi atau level kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMK sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dunia kerja. Skema kualifikasi ini memungkinkan uji kompetensi dilakukan dengan lebih terstruktur dan mengacu pada standar internasional yang mengategorikan tingkat keterampilan dalam berbagai level, mulai dari level dasar hingga tingkat lanjutan. Dan saat ini, perubahan skema menjadi skema okupasi, yang kini menjadi acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi di SMK Tata Boga. Skema okupasi berfokus pada pengujian keterampilan yang langsung berhubungan dengan jenis pekerjaan atau okupasi tertentu dalam industri kuliner. Dalam sistem ini, uji kompetensi diadakan dengan mengacu pada standar okupasi yang sudah teridentifikasi di dunia kerja, seperti *butcher*, *baker*, *commis pastry*, *chef de partie*, *commis chef*, *demi chef*, dan *executive chef*. Siswa diuji sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka pilih, sehingga pengujian menjadi lebih spesifik dan terarah berdasarkan jenis pekerjaan. Selain itu, skema okupasi ini sangat relevan dengan kebutuhan industri yang mengharapkan para lulusan SMK memiliki seperangkat kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pekerjaan di tempat kerja.

Perubahan jenis skema uji kompetensi dari skema cluster, kualifikasi, hingga okupasi ini dalam rangka menjawab tantangan dunia industri yang semakin menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik dan siap pakai. Implementasi skema okupasi ini diharapkan siswa dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja dengan bekal keterampilan yang relevan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Perubahan ini juga memberikan kejelasan bagi para siswa, guru, dan pihak industri tentang kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan, sehingga meningkatkan daya saing lulusan di pasar tenaga kerja global.

c. Implementasi *Skill Passport* di SMK

Penerapan *skill passport* sebagai portofolio kompetensi siswa sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan UKK siswa SMK. Kompleksitas materi uji unit kompetensi pada UKK membutuhkan data dukung portofolio kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman belajar sebelumnya. Namun, implementasi perekaman capaian kompetensi sebagai portofolio siswa di SMK bidang keahlian Tata Boga di Provinsi Kalimantan Timur masih terbatas pada bentuk asesmen capaian pembelajaran mata pelajaran yang dilakukan setiap semester. Disamping itu, asesmen capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran hanya sebatas evaluasi penguasaan konten mata pelajaran dan belum mengarahkan evaluasi capaian kompetensi baik berdasarkan SKKNI maupun ASEAN *Toolbox*. Asesmen kompetensi yang dilakukan belum cukup memberikan gambaran menyeluruh tentang kompetensi yang telah dicapai oleh siswa sepanjang pendidikan mereka, terutama dalam hal mendukung pemenuhan kompetensi minimal terhadap jabatan pada bidang *food production*. Hal ini dinyatakan pada salah satu hasil wawancara pada salah satu Kepala sekolah SMK di Penajam Paser Utara.

“...Selama ini pelaksanaan uji kompetensi pada bidang f&B produk dan service, dimana untuk ujian bagi siswa masih diuji secara keseluruhan baik wawancara maupun praktek sehingga beban ujian siswa semakin tinggi tanpa adanya portfolio pencapaian kompetensi yang telah dipelajari siswa pada semester sebelumnya “(W4, KS, 22/10/2024).

Keterbatasan utama dari evaluasi yang ada saat ini adalah bahwa proses perekaman capaian kompetensi masih bersifat parsial dan terpisah-pisah. Evaluasi yang dilakukan melalui asesmen mata pelajaran tidak mencakup semua aspek kompetensi minimal yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tertentu pada bidang *food production*. Selain itu, evaluasi ini juga tidak mencatat progres perkembangan kompetensi siswa dari waktu ke waktu, yang seharusnya dapat membantu baik siswa maupun pengajar untuk mengetahui area kompetensi yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi dengan pendekatan ACCSTP sangat diperlukan untuk mendukung portofolio kompetensi siswa. Selain itu, evaluasi capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mengacu ACCSTP akan memperkuat kesesuaian materi uji kompetensi pada kegiatan UKK.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para guru SMK ditemukan bahwa SMK bidang keahlian Tata Boga di Provinsi Kalimantan Timur belum menerapkan skill passport sebagai media pengakuan kompetensi siswa yang diperoleh melalui pengalaman belajar sebelumnya. Pihak SMK menyadari bahwa portofolio kompetensi siswa dalam bentuk *skill passport* sangat dibutuhkan dan cocok diterapkan pada siswa SMK. Bahkan, *skill passport* juga akan dapat merekam pengalaman belajar siswa melalui *teaching factory*. Hingga kini, tidak ada alat ukur evaluasi keterlibatan siswa pada pembelajaran *teaching factory*. Menurut pengalaman siswa, mereka tidak pernah mendapatkan pengakuan capaian kompetensi setelah terlibat kegiatan *teaching factory*. Dengan demikian, hadirnya *skill passport* akan memberikan manfaat langsung kepada siswa mengenai bukti capaian kompetensi siswa di kegiatan *teaching factory*.

4. Kesimpulan

Skill passport berbasis ASEAN *Toolbox* memiliki peran krusial bagi siswa SMK dalam mengembangkan dan mendokumentasikan keterampilan yang relevan dengan standar ASEAN serta kebutuhan industri khususnya pada bidang pariwisata. Melalui *skill passport*, siswa dapat secara sistematis merekam capaian kompetensi mereka yang mengacu pada standar okupasi ASEAN *Toolbox*. Hasil penelitian ini tidak hanya membantu siswa dalam merencanakan dan memantau perkembangan mereka sendiri, tetapi juga memfasilitasi proses evaluasi yang holistik oleh guru dan pihak terkait dalam mengukur pencapaian keterampilan.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas bagi siswa untuk mengembangkan dan mengevaluasi kemampuan mereka sesuai dengan standar yang diakui secara regional dan internasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi penting bagi praktisi pendidikan kejuruan untuk penerapan mekanisme pengakuan atau penyetaraan capaian kompetensi peserta didik pendidikan vokasi berbasis *skill passport* baik siswa SMK maupun mahasiswa politeknik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi SMK dan pemerintah dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap tuntutan pasar kerja regional dan internasional, serta memperkuat integrasi regional di bidang pendidikan dan tenaga kerja dalam konteks ASEAN.

6. Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didanai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dengan nomor kontrak: 070/116/Litbang/2024. Terimakasih kami sampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan dana yang diberikan sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

Daftar Pustaka

- ASEAN. (2013). *ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals Handbook*. ASEAN.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019*.
[https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html#:~:text=Youtube-,Agustus 2019%3A Tingkat Pengangguran Terbuka,TPT\) sebesar 5%2C28 Persen](https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html#:~:text=Youtube-,Agustus 2019%3A Tingkat Pengangguran Terbuka,TPT) sebesar 5%2C28 Persen)
- Bateman, A., & Knight, B. (2003). *Giving Credit, A Review of RPL and Credit Transfer in Vocational Education and Training Sector*. National Centre for Vocational and Educational Research (NCVER).
- Breen, R. (2005). Explaining cross-national variation in youth unemployment: market and institutional factors. *European Sociological Review*, 21(2), 125–134.
- Cameron, R. (2011). Australia: An overview of 20 years of research into the recognition of Prior Learning (RPL). In *Researching the Recognition of Prior Learning* (p. 14-43).
- Demirović Bajrami, D., Terzić, A., Petrović, M. D., Radovanović, M., Tretiakova, T. N., & Hadoud, A. (2020). Will we have the same employees in hospitality after all? The impact of COVID-19 on employees' work attitudes and turnover intentions. *International Journal of Hospitality Management*, 102754. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102754>
- Eby, L. T., Butts, M., & Lockwood, A. (2003). Predictors of success in the era of the boundaryless career. *Journal of Organizational Behavior*, 24(6), 689–708.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/job.214>
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). *Educational research: An introduction* (7th ed.). Allen and Bacon.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- Hardani, Auliya, Ria dkk, (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5).
- Harris, J. (1999). Ways of seeing the Recognition of Prior Learning (RPL): What contribution can such practices make to social inclusion? *Studies in the Education of Adults*, 31(2), 124–139. <https://doi.org/10.1080/02660830.1999.11661407>
- Haydon, A. P. (1994). *Credit Transfer and Recognition of Prior Learning in Australian Universities*. Higher Education Series, AGPS.
- Jung, H. S., Jung, Y. S., & Yoon, H. H. (2021). COVID-19: The effects of job insecurity on the job engagement and turnover intent of deluxe hotel employees and the moderating role of

- generational characteristics. *International Journal of Hospitality Management*, 92, 102703.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102703>
- Lee, P. C., Xu, S. (Tracy), & Yang, W. (2021). Is career adaptability a double-edged sword? The impact of work social support and career adaptability on turnover intentions during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Hospitality Management*, 94, 102875.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102875>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (2rd ed). Sage Publication.
- Miller, A. (2009). The world of e-portfolio. *The Knowledge Tree*, 18.
- OECD, & ILO. (2014). *Promoting Better Labour Market Outcomes for Youth: Report on Youth Employment and Apprenticeships prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pub. L. No. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (2020). https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen RPJMN 2020-2024/Lampiran 1. Narasi RPJMN 2020-2024.pdf
- Wolf, A. (2011). *Review of vocational education: The Wolf report*.
<https://doi.org/10.1037/h0066788>